



Nomor : 990/WK/SEKPER/2025

Jakarta, 25 November 2025

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPO
atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya
Tahap IV Tahun 2019**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada Selasa, 9 Desember 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan RUPO yang telah dilakukan pada Selasa, 25 November 2025 pada Surat Kabar Investor Daily Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Direksi

Cegah Kepadatan Nataru, Angkutan Barang Dibatasi

JAKARTA, ID – Untuk mengantisipasi kepadatan pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, pemerintah bakal membatasi angkutan barang dan menyesuaikan pola libur Aparatur Sipil Negara (ASN).

Oleh **Ichsan Amin**

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan sejumlah hal yang perlu diantisipasi pada penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 selain uji petik, yakni mengatur kebijakan cuti bersama. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah merumuskan stimulus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

Di sisi lain, akan ada SKB mengenai pembatasan angkutan barang selama periode Nataru dalam rangka memastikan pergerakan masyarakat lebih lancar. “Jangan sampai kita luput dari warga masyarakat yang melakukan perjalanan secara bersamaan. Sehingga perlu diantisipasi melalui pengaturan perjalanan lewat cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara,” kata Menhub dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa momen Nataru identik den-

gan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sebab, selain berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan, momen Nataru juga kerap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur.

“Destinasi utamanya, selain pulang kampung ya liburan, ke daerah-daerah tempat liburan, maka perlu melakukan berbagai persiapan terutama menjaga mobilitas masyarakat bisa berjalan lancar,” ungkapnya.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga inflasi menjelang Nataru karena dalam periode ini tingkat konsumsi masyarakat juga diperkirakan meningkat. Sehingga diperlukan pasokan stok yang aman dan harga komoditas yang terkendali.

“Ini butuh koordinasi juga dengan pemerintah daerah tentu saja. jadi, tidak hanya soal mengendalikan tarif tapi juga bagaimana sektor lain juga terkendali,” imbuhnya.

Secara terpisah, pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menilai penerbitan SKB mengenai cuti bersama ASN dan pembatasan angkut barang harus mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya semua masu-

kan harus dipertimbangkan mengenai waktu pelaksanaannya. “Jangan sampai libur bersama tidak tepat, atau jangan sampai larangan angkutan barang terlalu lama dilarang beroperasi,” ungkap Djoko kepada *Investor Daily*.

Mengacu pada momen-momen puncak pada libur Nataru dan Idulfitri sebelumnya dimana pembatasan angkutan barang dikeluhkan pelaku usaha. Menurut Djoko, periode larangan angkutan barang yang ditetapkan pemerintah dinilai terlalu lama dan merugikan kalangan pengusaha. Di sisi lain, waktu libur yang bersamaan antara ASN dan kalangan sektor transportasi darat, pelaksanaan *ramp check* dimulai sejak 7 November 2025, dan akan dilakukan hingga 2 Januari 2026. Cakupannya meliputi *pool* bus, jalur wisata strategis, serta terminal yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Lampung.

Selain itu, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, NTT, NTB, Papua, Bengkulu, serta Sulawesi Barat. Adapun target operasi *ramp check* sebanyak 15.000 kendaraan.

Untuk sektor transportasi

Kebijakan Diskon Tarif Nataru

Moda Angkutan	Persentase Diskon (%)	Target (penumpang)
Pesawat	13-14 %	3,59 juta
Kereta Api	30 %	1,5 juta
Angkutan Laut	20 %	405 ribu
Angkutan Penyeberangan	100 % (Jasa Kepelabuhanan)	227 ribu



laut, setiap kapal penumpang yang akan beroperasi wajib menjalankan pemeriksaan kelaiklautan secara menyeluruh, guna memastikan keselamatan pelayaran.

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah membentuk Tim Uji Petik yang melakukan *ramp check* di sejumlah pelabuhan padat penumpang antara lain Pelabuhan Tanjung Perak, Makassar, Batam, Ambon, Banten, Bitung, Dumai, Sorong, Kendari, Kotabaru-Batulicin, Ternate, Kupang, Tanjung Wangi, Merauke, serta Muara Angke. Kemudian, dilakukan juga koordinasi intensif dengan BMKG untuk memperoleh pembaruan perkiraan cuaca dan menerapkan SOP jika terjadi cuaca ekstrem.

Sedangkan di sektor transportasi udara, *ramp check* akan dilakukan mulai 21 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026 untuk menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan.

Ramp check akan dilakukan pada 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan.

Adapun, pada sektor perkeretaapian, *ramp check* dilakukan terhadap sarana dan prasarana, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan inspeksi keselamatan di lintas operasi.

Selain *ramp check*, kebijakan dan strategi lain juga telah disiapkan untuk menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan transportasi antara lain melalui koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia dan operator, penyiapan sumber daya manusia, antisipasi cuaca, regulasi tentang keselamatan, serta penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 yang melibatkan lebih dari 12.000 personel dari unsur kementerian/lembaga juga *stakeholder*.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, sehingga dapat berkumpul dengan keluarga tercinta tanpa kendala berarti. Kami mengimbau seluruh pengguna transportasi untuk tetap mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama,” kata Dudy.

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 (“**Pemegang Obligasi**”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 9 Desember 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Karya Lt. 11
Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

Agenda RUPO:

- Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya:
 - Kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, dan
 - Kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, serta usulan Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 serta kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
- Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 serta kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 25 November 2025

EMITEN

WASKITA
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT

BANK MEGA
PT BANK MEGA TBK

**CONGRATULATIONS TO ALL
THE DISTINGUISHED RECIPIENTS OF THE**

**INVESTOR DAILY
INDONESIA
ESG**
ENVIRONMENTAL · SOCIAL · GOVERNANCE
BERSAMA MEMBANGUN KEBERLANJUTAN

**BY BUILDING SUSTAINABILITY TOGETHER, YOUR
DEDICATION PAVES THE WAY SO THAT INDONESIA CAN
EMERGE AS A GLOBAL LEADER IN SUSTAINABLE GROWTH.**

ECO-INNOVATION

CERTIFIED GOVERNANCE